

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Desember 2024
Waktu	: 11.45 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: 1. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (per Oktober); 3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2025; dan 4. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/FPGerindra) dilanjutkan oleh Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	: Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 44 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. (Menteri Pertanian); 2. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian); 3. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Plt. Sekretaris Jenderal sekaligus Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian); 4. Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D (Plt. Direktur Jenderal Lahan dan irigasi Pertanian); 5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian); 6. Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan); 7. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Hortikultura); 8. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Perkebunan); 9. Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);

10. Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
11. Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian); dan
12. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, dalam rangka membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (per Oktober), Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2025, dan Isu-isu aktual, dibuka pukul 11.45 WIB oleh Ketua Rapat, Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/FPGerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2023 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI tahun 2023 serta meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar pada tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan atas capaian penyerapan anggaran Kementerian Pertanian per tanggal 30 November 2024 sebesar 76,87% atau senilai Rp11.640.784.167.423,- (sebelas triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Serta sebesar 86,64% dengan memperhitungkan *outstanding contract* atau senilai Rp13.120.018.706.889,- (tiga belas triliun seratus dua puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan semua kegiatan dan realisasi serapan anggaran minimal 96% pada akhir Desember 2024.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan penyempurnaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan penyederhanaan dalam perencanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan

Rapat Kerja bersama dengan Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait.

4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Pertanian atas perubahan struktur pada Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian dipecah menjadi dua, yaitu Direktorat Jenderal Lahan & Irigasi Pertanian, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan
 - b. Perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar perubahan struktur organisasi berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian Pertanian dan dapat mempercepat pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jumlah dan kesejahteraan penyuluh dengan meningkatkan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) guna mendukung kinerja penyuluh.
6. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan re-alokasi anggaran Kementerian Pertanian mendukung swasembada pangan dengan total pagu alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp29.373.984.361.000,00 (dua puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total pagu komposisi anggaran per Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.398.125.415.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp128.236.504.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.547.305.410.000,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp446.866.393.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp331.777.059.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.213.291.406.000,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah);
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp20.557.088.625.000,00 (dua puluh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar Rp929.038.379.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp822.255.170.000,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Menteri Pertanian,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P.
A-162